

KAJIAN BUDAYA EKONOMI KREATIF DI LIMA KECAMATAN

Tri Wisnu Dono Kuncoro

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Bayu Harjono

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

***Abstract.** Creative Economy according to Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy is defined as the embodiment of added value from intellectual property originating from human creativity based on cultural heritage, science and/or technology. The creative economy is a form of economic activity that leads to an increase in the added value of a product resulting from the processing of taste and initiative as well as the creativity of the actors. The Indonesian Ministry of Trade stated that the creative economy is an effort to develop a sustainable economy through creativity with an economic climate that is competitive and has reserves of renewable resources. The 2009-2015 National Creative Economy Development Blueprint (2008) defines the Creative Economy as a new era of economics after the agricultural economy, industrial economy, and information economy, which intensifies information and creativity by relying on ideas and knowledge from human resources as the main production factor in activities the economy. Based on some of the opinions above, the creative economy can be defined as a process of creating added value based on ideas that are born by creating a community of creativity that is supported by the use of science.*

***Keywords:** creative economy, creativity, trade.*

Abstrak. Ekonomi Kreatif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif merupakan sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah sebuah produk yang dihasilkan dari pengolahan rasa dan karsa serta kreatifitas para pelakunya. Kementerian Perdagangan Indonesia menyebutkan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 (2008) mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan nilai tambah berdasarkan ide yang dilahirkan dengan menciptakan suatu kreatifitas masyarakat yang didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

Kata kunci: ekonomi kreatif, kreatifitas, perdagangan.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015, terdapat 16 subsektor yang menjadi sasaran dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu: (1) Aplikasi dan Pengembangan Permainan; (2) Arsitektur; (3) Desain Interior; (4) Desain Komunikasi dan Visual; (5) Desain Produk; (6) Fashion; (7) Film, Animasi, dan Video; (8) Fotografi; (9) Kriya; (10) Kuliner; (11) Musik; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Seni Pertunjukan; (15) Seni Rupa; (16) Televisi dan Radio. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Surakarta telah menyusun sebuah Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2015 – 2025 yang didalamnya menetapkan prioritas pengembangan ekonomi kreatif terbagi kedalam 3 (tiga) prioritas, meliputi: 1) Subsektor Seni pertunjukkan, desain, kerajinan, Masakan/ Kuliner dan fesyen; 2) Subsektor Pasar seni dan barang antik, Riset dan Pengembangan, Video, Film dan Fotografi, Musik, dan Periklanan; 3) Subsektor Televisi & radio, Layanan Komputer dan piranti lunak, Arsitektur, Permainan interaktif, Penerbitan dan Percetakan.

Kota Surakarta sendiri menjadi salah satu pionir sebagai kota Kreatif di Indonesia. Sejak peluncuran Ekonomi Kreatif, kota Surakarta telah menyusun Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2015-2025. Berdasarkan Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2015 -2025, kota Surakarta telah memetakan 15 Sektor Ekonomi Kreatif ke dalam Sektor Industri Kreatif di Kota Surakarta menjadi 50 sub sektor Industri kreatif yang dikembangkan di Kota Surakarta. Dari 15 sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Surakarta, terdapat 5 sektor ekonomi kreatif yang masuk prioritas pertama dan merupakan sektor penting untuk dikembangkan di Kota Surakarta, yaitu seni pertunjukan, desain, kerajinan, makanan dan fesyen.

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Konsep Pengembangan Budaya Ekonomi Kreatif

1. Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif (Ekraf) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan

intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Makna kreativitas yang terkandung dalam pendefinisian ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai kapasitas atau daya upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan (*thinking outside the box*). Definisi tentang Ekonomi Kreatif kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2024 yang menyatakan bahwa yang ide atau gagasan kekayaan intelektual tersebut merupakan karya yang orisinal, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis IPTEK, keterampilan, serta warisan budaya.

Inovasi dan penemuan (*invention*) adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kreativitas. Kreativitas merupakan faktor pendorong munculnya inovasi atau penciptaan karya kreatif dengan memanfaatkan penemuan (*invention*) yang sudah ada. Ekonomi kreatif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena ide dan kreativitas adalah sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui. Kreativitas akan melahirkan inovasi dan penemuan yang tidak hanya dapat melipatgandakan produktivitas tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah. Ekonomi kreatif tidak hanya menghasilkan karya kreatif yang dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh sektor-sektor lain.

Ekonomi kreatif erat kaitannya dengan industri kreatif, namun ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekosistem yang memiliki hubungan saling ketergantungan antara rantai nilai kreatif (*creative value chain*); lingkungan pengembangan (*nurturance environment*); pasar (*market*) dan pengarsipan (*archiving*). Ekonomi kreatif tidak hanya terkait dengan penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan, oleh karena itu, ekonomi kreatif selain dapat meningkatkan daya saing, juga dapat meningkatkan kualitas hidup pembangunan daerah.

2. Peran Ekonomi Kreatif dalam Menunjang Perekonomian Daerah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar bagi tambahan informasi yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi setiap orang dalam tujuannya meningkatkan kualitas hidup, salah satunya adalah dengan meningkatkan kreativitas diberbagai bidang yang

diinginkan. Perkembangan teknologi informasi juga mampu memberikan wawasan dan inovasi sehingga mendorong setiap orang untuk dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas dalam menghasilkan berbagai temuan dan produk hasil inovasi, proses produksi hingga pengembangan produknya, hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan pentingnya pengetahuan mengenai ekonomi kreatif oleh setiap orang.

Ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tingkat persaingan yang kompetitif, sehingga tingkat persaingan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar proses tingkat proses produksi yang dilakukan tapi juga aspek kreativitas dan inovasi mulai memegang peranan yang sangat penting selain itu faktor teknologi memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi kreatif.

Industri kreatif memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional karena memberikan kontribusi terhadap aspek kehidupan baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Secara ekonomi industri kreatif berperan dalam menciptakan iklim bisnis, penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, penciptaan sumber daya yang terbaharukan, dan berkontribusi positif terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Ekonomi kreatif akan menggeser produk-produk hasil industri konvensional dan memberikan solusi baru yang lebih tepat untuk kebutuhan pasar.

GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN EKONOMI KREATIF KOTA SURAKARTA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri sehingga evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021. Pada awal penyebaran wabah Covid-19 di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif.

Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran wabah Covid-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran wabah Covid-19 tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan social distancing dan lockdown, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi.

Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar dari pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara dunia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak.

B. Ekonomi Kreatif

1. Kondisi Umum Industri Kreatif Kota Surakarta

Pada tahun 2019 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menambah jumlah pengelompokan Ekonomi Kreatif menjadi 17 Sektor yaitu : arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual (DKV), desain produk, fashion, film animasi video, fotografi periklanan, kerajinan (kriya), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, tv dan radio, seni pertunjukkan, dan seni rupa.

Kota Surakarta sendiri menjadi salah satu pionir sebagai kota Kreatif di Indonesia. Sejak peluncuran Ekonomi Kreatif, kota Surakarta telah menyusun Blue Prin Pengemabnagan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta 2015 -2025. Berdasarkan Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2015 -2025, kota Surakarta telah memetakan 15 Sektor Ekonomi Kreatif ke dalam Sektor Industri Kreatif di Kota Surakarta menjadi 50 sub sektor Industri kreatif yang dikembangkan di Kota Surakarta.

ANALISIS KONDISI PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF (3 SUBSEKTOR) DI KOTA SURAKARTA

Penggambaran kondisi pelaku usaha ekonomi kreatif sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki para pelaku ekonomi kreatif dan juga peluang serta hambatan yang dihadapi. Dengan mengetahui kekuatan kelemahan,, peluang dan hambatan dapat dijadikan dasar dalam memuskan strategi

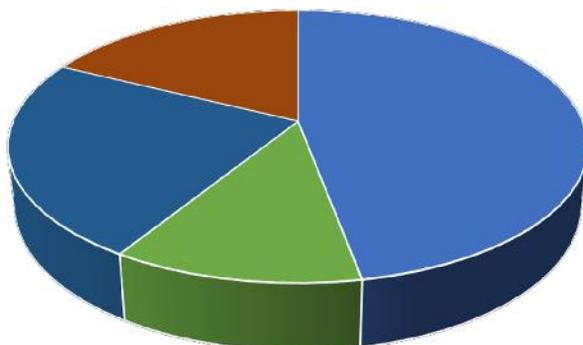
dan arah kebijakan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif khususnya sub sektor seni pertunjukan, kerajinan (kriya) dan kuliner. Untuk memperoleh gambaran pelaku usaha ekonomi kreatif maka dilakukan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google-form.

A. Subsektor Seni Pertunjukan

1. Identitas Responden

a. Pendidikan Responden

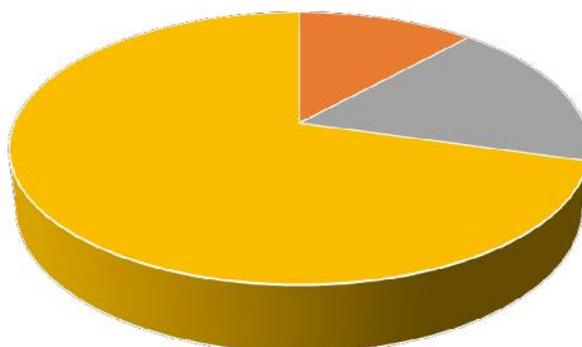
Tingkat pendidikan responden bervariasi, mulai dari lulusan SLTA, Pendidikan D3/S1, Pendidikan S2, dan pendidikan S3. Rata-rata pendidikan responden merupakan lulusan SLTA dengan persentase sebanyak 47%. Secara rinci pendidikan responden dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden (%) Sumber: Hasil Penelitian (2020)

b. Lama Pendirian Usaha

Rata-rata usaha Seni Pertunjukan yang mendukung terhadap industri kreatif di Kota Surakarta berusia lebih dari 10 tahun. Kondisi ini tercermin dari jawaban responden sebesar 70%. Sedangkan, usaha dengan usia 5-10 tahun sebesar 18%. Adapun sisanya merupakan usaha yang berdiri pada kisaran 3-5 tahun, yaitu sebesar 12%.



Grafik 2. Lama Pendirian Usaha (%) Sumber: Hasil Penelitian (2020)

KONTRIBUSI EKONOMI KREATIF 3 SUBSEKTOR TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

Kota Surakarta memiliki potensi industri kreatif yang besar dan posisinya tersebar di beberapa subsektor lapangan usaha. Secara umum peran ekonomi kreatif khususnya subsektor seni pertunjukan, kuliner dan kriya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tersebar dalam lapangan usaha sektor: (1) industri pengolahan, (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan (3) Jasa lainnya. Sektor Jasa lainnya, industri pengolahan dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan tiga dari sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2019 sebesar 5-12% , serta mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu: Jasa Lainnya sebesar 7,44% , Industri Pengolahan sebesar 5,88% , dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pertumbuhannya sebesar 5,21% .

STRATEGI PENGEMBANGAN EKRAF PADA 3 SUBSEKTOR

Dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan budaya ekonomi kreatif Kota Surakarta maka untuk menjaga sinergitas dokumen perencanaan terkait baik pusat, provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta sehingga perlu untuk menelaah kebijakan terkait dari berbagai dokumen yang selengkapnyanya dijelaskan sebagai berikut:

A. Telaah Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025

Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 menjelaskan bahwa visi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 adalah “Ekonomi Kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional”. Dengan misi:

1. Pemberdayaan kreatifitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui: peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

- a. pembentukan dan pengembangan ruang kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi warisan budaya lokal;

- b. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan kekayaan intelektual;
 - c. penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung berkembangnya kreativitas; dan
 - d. pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas.
2. Pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing yang dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan pembudayaan bagi usaha ekonomi kreatif;
 - b. peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif;
 - e. peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif didalam negeri dan luar negeri;
 - f. penguatan regulasi bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 Prinsip pengembangan ekonomi kreatif nasional meliputi:
 1. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
 2. peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi.
 3. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.
 4. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam penyusunan kajian budaya ekonomi kreatif Kota Surakarta sejalan dengan amanat dalam Rencana Induk

Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 yaitu peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif. Hal ini juga selaras dengan pemanfaatan kekayaan budaya yang ada di Kota Surakarta sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, serta eksistensi Kota Surakarta.

B. Telaah RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang harus diimplementasikan yaitu:

Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

1. Pendidikan tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama; Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai

media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

Satgas kemiskinan merupakan satuan yang aktif dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa. Salah satu program yang juga

menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan start up wirausaha baru, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi pemuda, pelaku usaha pemula, fasilitasi aspek legalitas (perijinan, merk, standarisasi), modal, peralatan, dan jaringan pemasaran, serta dengan mendorong kebijakan internalisasi pendidikan kewirausahaan.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

Program ini dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; pemerintah membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD pertanian; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa sebagaimana tertuang dalam amanat Perda No 5 tahun 2016.

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan. Selain itu juga dilakukan upaya pemenuhan air baku untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat dan mendukung pengembangan kawasan industri.

Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi; Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (food, feed, fuel, fertilizer, fiber). Selain itu juga

mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

8. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jempot bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani. Program ini juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat melalui kombinasi program kesehatan, pendidikan serta kesehatan lingkungan.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin, dan pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel. Program ini dilakukan dengan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, bantuan operasional sekolah, serta pengembangan kebijakan pendidikan inklusi.

Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

9. Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga.

10. Program pengembangan rumah budaya Jawa Tengah diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks- Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program ini mendorong peningkatan kepedulian manusia terhadap lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan sebagai salah satu nilai karakter yang harus dibangun, sedangkan konservasi dan memulihkan kembali fungsi lingkungan adalah agar dapat terwujud keseimbangan. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam penyusunan kajian budaya ekonomi kreatif Kota Surakarta sejalan dengan fokus amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu program prioritas terkait Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Kajian Budaya Ekonomi Kreatif di Lima Kecamatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dari tahun 2015- 2019 secara rata- rata mencapai 5,61 persen, Melihat Prospek pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah

menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia.

3. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah Kota Surakarta tahun 2019 sebesar 3,61 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDRB pengeluaran pada tahun 2020 yang akan didorong dalam peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19.
4. Dari sisi lapangan usaha, mendasarkan proyeksi PDB Nasional tahun 2020 dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Melihat kondisi ini Pemerintah Kota Surakarta perlu berupaya melakukan pemulihan ekonomi untuk diarahkan menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor
5. Berdasarkan Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Tahun 2015 -2025, kota Surakarta telah memetakan 15 Sektor Ekonomi Kreatif ke dalam Sektor Industri Kreatif di Kota Surakarta menjadi 50 sub sektor Industri kreatif yang dikembangkan di Kota Surakarta. Dari 15 sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Surakarta, terdapat 5 sektor ekonomi kreatif yang masuk prioritas pertama dan merupakan sektor penting untuk dikembangkan di Kota Surakarta, yaitu seni pertunjukan, desain, kerajinan, makanan dan fesyen
6. Data BPS pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki 82.547 Industri kreatif yang tersebar di 16 Sub sektor Industri Kreatif. Dari jumlah tersebut yang masuk ke 6 sub sektor prioritas (Desain, Digital, Kuliner, Fashion, Kriya/Craft, dan Seni Pertunjukan) adalah sebanyak 21% dari total industri kreatif yang ada di Surakarta yaitu 17.335 industri Mikro Kreatif.
7. Di akhir tahun 2018 menurut data BPPT yang di-ekstrapolasi BPS sumbangan ekonomi kreatif Indonesia terhadap PDB mencapai Rp 1.105 triliun. Berdasarkan data BPS, nilai ekonomi kreatif di tahun 2015 mencapai 852 triliun rupiah, dan naik menjadi Rp 922,59 triliun atau setara 7,44% terhadap PDB pada 2016. Selanjutnya naik menjadi Rp 1.102 triliun di tahun 2017, dan tumbuh menjadi Rp1.105 triliun pada tahun 2018. Di akhir 2019 kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB naik menjadi 1.211 triliun

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surakarta dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 di Kota Surakarta tentunya perlu meninjau kembali target pertumbuhan ekonomi dalam RKPD tahun 2020 sebesar 5,77 – 6,17 persen.
2. Peran industri ekonomi kreatif sub sektor seni pertunjukan, kuliner dan kriya dalam perekonomian daerah perlu didorong kontribusinya dalam (1) sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyediaan lapangan kerja yang terbesar, (3) pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam pasar internasional. Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi, ekonomi kreatif perlu memperoleh perhatian, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini relatif akan sulit menarik investasi. Untuk itu, keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah Kota Surakarta perlu diarahkan pada upaya mengembangkan industri ekonomi kreatif melalui optimalisasi pemulihan ekonomi daerah.
3. Strategi pengembangan ekraf sebagai hasil dari kajian ini perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku sehingga dapat diintegrasikan didalam dokumen perencanaan tahunan, baik RKPD maupun Renja Perangkat Daerah.
4. Perlu dilakukan penelitian terhadap kesediaan/kesiapan stakeholder yang terkait dengan pengembangan Ekraf dari aspek Permodalan dan SDM, seperti lembaga penyedia permodalan dan lembaga peningkatan kapasitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2019). Surakarta Dalam Angka. Diakses dari <https://surakartakota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2019). Jawa Tengah Dalam Angka. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indonesia Dalam Angka. Diakses dari <https://www.bps.go.id/>